

Implementasi Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Nur Fadilla, Dian Prima Safitri, Fitri Kurnianingsih

Email : fadillanur267@yahoo.com

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Permasalahan sampah di Indonesia menjadi perhatian penuh pemerintah dikarenakan pengurangan dan penanganan sampah di Indonesia belum berjalan secara optimal. Salah satunya Indonesia menduduki rangking 2 penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Banyaknya sampah di pesisir/pantai termasuk tumpukan di jalan dan lokasi lainnya, serta banyaknya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang belum beroperasi secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut diatas dan beberapa hal lainnya membuat Pemerintah pusat dalam hal ini mencari solusi untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Oleh karena itu Pemerintah pusat mengamanahkan kepada setiap daerah untuk membuat JAKSTRADA pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang mana peraturan ini dibuat proporsi antara pengurangan dan penanganan sampah dengan persentase 30% pengurangan dan penanganan 70% sampah di tahun 2025. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selama proses implementasi, komunikasi masih belum menyeluruh untuk masyarakat, sumber daya manusia pelaksana masih minim. Berdasarkan pada fenomena yang terjadi peneliti tertarik menganalisisnya menggunakan teori Edwards III dari implementasi kebijakan yang terdiri dari empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa informasi belum sepenuhnya sampai kemasyarakat. Jumlah sumber daya manusia masih minim. Disposisi pelaksana kebijakan dikatakan memiliki komitmen yang baik untuk pencapaian suatu tujuan kebijakan. Struktur organisasi pun untuk kegiatan terencana secara baik.

Kata Kunci: Pengelolaan sampah rumah tangga, implementasi kebijakan.

ABSTRACT

The problem of waste in Indonesia becomes the government's full attention because the reduction and handling of waste in Indonesia has not been running optimally. One of them is Indonesia which ranks the second largest contributor of plastic waste in the sea. Amount of rubbish on the coast / beach including piles on roads and other locations. Based on the above and several other things make the central government in this case looking for solutions to overcome the waste problem. Therefore, the central government mandates each region to make JAKSTRADA the management of household rumors and household-like rubbish in which this regulation is made the proportion between reduction and handling of waste with a percentage of 30% reduction and 70% handling of waste in 2025. The purpose of this study to find out how the implementation of Tanjungpinang Mayor Regulation Number 43 Year 2018 regarding Regional Policies and Strategies in the Management of Household Waste and Trash of Similar Household Waste. This research is a qualitative descriptive study using interview, observation and documentation data collection techniques. During the implementation process, communication is still not comprehensive for the community, implementing human resources are still minimal. This study uses Edwards III's policy implementation theory which consists of four indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study reveal that information has not yet fully reached the community. The number of human resources is still minimal, the disposition of policy implementers is said to have a good commitment to achieving a policy goal. The organizational structure for well planned activities.

Keywords: Management of household waste, policy implementation.

PENDAHULUAN

Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana implementasi dari Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Permasalahan sampah di Indonesia menjadi perhatian penuh pemerintah dikarenakan pengurangan dan penanganan sampah di Indonesia tidak berjalan baik. Salah satunya Indonesia meduduki rangking 2 penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Banyaknya sampah di

pesisir/pantai termasuk tumpukan di jalan dan lokasi lainnya, serta banyaknya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum beroperasi secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut diatas dan beberapa hal lainnya membuat Pemerintah pusat dalam hal ini mencari solusi untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Oleh karena itu Pemerintah pusat mengamanahkan kepada setiap daerah untuk membuat JAKSTRADA pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang mana peraturan ini dibuat proporsi antara pengurangan dan penanganan sampah dengan persentase 30% pengurangan dan penanganan 70% sampah di tahun 2025.

JAKSTRADA merupakan amanat dari Kebijakan dan Strategi Nasional (JASTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang baru ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampah ke pemrosesan akhir..

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2014:4) metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sugiyono (2011:11) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan, penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kota Tanjungpinang, khususnya yaitu Kantor Dinas Lingkungan Hidup beralamat di Jl. Daeng Marewa, Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang beralamat di Jl. Peralatan, Melayu Kota Piring, Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah sumber dari data primer dan sekunder. Data primer dilakukan melalui hasil wawancara terhadap informan yang telah ditentukan. Data sekunder berupa artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah populer, buku atau telaah gambar hidup, atau artikel-artikel yang ditemukan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritisi sesuatu penelitian original yang lain.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kota Tanjungpinang, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kota Tanjungpinang, Sekretaris DP3AM Kota Tanjungpinang, Kepala Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Kota Tanjungpinang, Staf Pengelola Penataan Sampah Kota Tanjungpinang, Pengawas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan masyarakat.

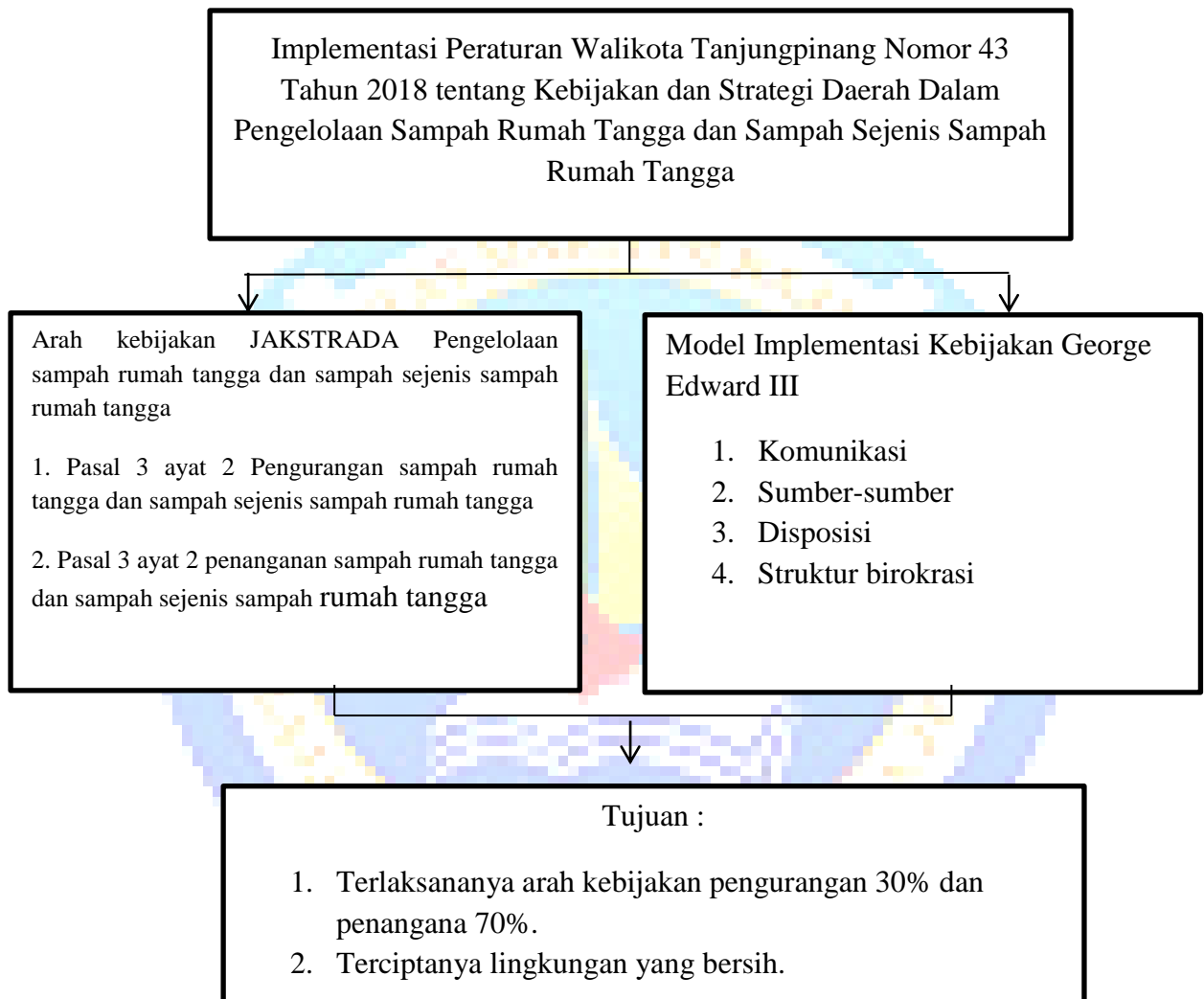
Wawancara adalah cara menjangkau informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan (Surwartono, 2014:48). Wawancara memungkinkan peneliti memperoleh banyak data yang berguna bagi penelitiannya. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penulisan. Wawancara dilakukan dilapangan dengan menggunakan pedoman wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor 43 Tahun 2018, merupakan amanah Pemerintah Pusat untuk setiap daerah membuat peraturan JAKTRADA pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga dimana peraturan ini untuk kedepannya menjadi salah satu syarat dalam penilaian Adipura. Proses implementasi dilihat melalui teori implementasi kebijakan George C. Edward III, dimana dalam teori

ini ada beberapa faktor kritis yang harus diperhatikan dalam implementasi sebuah kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Gambar 1
Kerangka berpikir



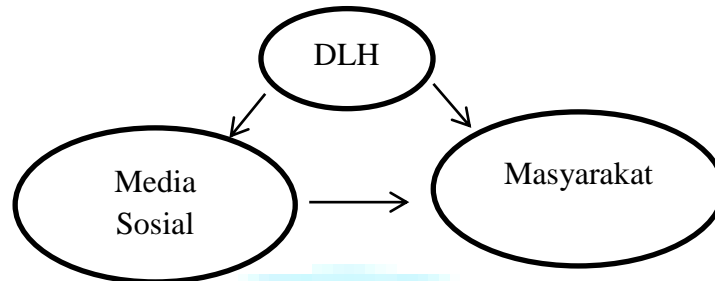
Sumber : Analisis peneliti, 2019

1. Komunikasi

Pelaksanaan proses komunikasi dalam implementasi Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdapat faktor pendorong yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana, kejelasan informasi kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan baik, serta terdapatnya konsistensi dalam pencapaian implementasi kebijakan, artinya tidak ada perintah yang bertentangan. Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai JAKSTRADA pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga belum secara menyeluruh, informasi mengenai kebijakan JAKSTRADA pengelolaan sampah rumah tangga baru dilakukan melalui media komunikasi.

Komunikasi yang dilakukan merupakan komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan masyarakat melalui sosialisasi. Berikut digambarkan pola komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat mengenai JAKSTRADA pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Gambar 2
Pola Komunikasi



2. Sumber Daya

Selain jumlah staf, sumber informasi juga merupakan salah satu mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan, para pelaksana perlu mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakn-kebijakn sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari para atasan. Selanjutnya wewenang, wewenang merupakan sumber lain yang penting bagi implementasi kebijakan. Wewenang ada dalam banyak bentuk dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, penyediaan fasilitas-fasilitas yang layak untuk mendukung implementasi yang efektif tidaklah selalu mudah. Terkadang terkendala di anggaran dana dan tempat yang tidak memadai.

Hal yang sesuai juga di ungkapkan Islamy (1998) dalam Siregar (2014:170) mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan *resources* yang cukup, seperti *human resources* (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung

jawabnya), *financial resources*, *technological resources*, maupun *psychological resources*.

3. Disposisi

Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat di wujudkan. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi (JAKSTRADA) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Tanjungpinang dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana. Berdasarkan hasil obeservasi di lapangan, jika dilihat dari sikap pelaksana terkait sudah cukup baik hal tersebut dibuktikan dengan peran para pelaksana dalam keberhasilan JAKSTRADA pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada terkait permasalahan sampah.

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan menurut Hessel (2003) dalam Siregar (2019:170) menyatakan jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan SOP di Dinas terkait untuk kegiatan program memang sudah ada ditetapkan di dinas terkait, sehingga tidak ada terjadinya kerancuan, SOP merupakan acuan untuk kinerja pegawai. Edward III dalam Winarno (2012:239) menyebutkan bahwa salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (*Standard Operating Procedures, SOP*), *Standard Operational Prosedur (SOP)* ini dapat membantu dan menyeragakan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah berjalan sejak ditetapkannya peraturan ini pada tanggal 10 Oktober 2018, dan sudah berjalan selama 10 bulan. Dalam kurun waktu tersebut implementasi JAKSTRADA Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga berjalan cukup baik walau masih jauh dari kata sempurna namun tidak dapat dikatakan gagal karena dari empat indikator Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi tidak terjadi masalah yang serius yang mengakibatkan pelaksanaan implementasi JAKSTRADA Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjadi terhambat atau terhenti.

Pada proses komunikasi masalah terjadi pada proses penyampaian informasi dimana penyampaian informasi sudah cukup jelas kepada para pelaksana kebijakan namun belum sampai pada masyarakat sebab hanya beberapa saja yang mengetahui esensi dari JAKSTRADA Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahkan sebagian besar tidak mengetahui tentang adanya JAKSTRADA Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pada proses sumber daya manusia untuk pelaksanaan JAKSTRADA Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga jumlahnya mencukupi dan keahlian pun masih perlu ditingkatkan. Anggaran bisa dikatakan cukup walaupun jumlahnya masih terbilang kecil untuk program JAKSTRADA pengelolaan sampah, namun itu bukan berarti suatu kendala namun hanya sebuah tantangan. Fasilitas yang berhubungan dengan JAKSTRADA pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga saat ini untuk alat pengangkutan sudah terbilang memadai. Disposisi untuk pelaksanaan JAKSTRADA pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tidak ada masalah, karna dalam pelaksanaan peraturan ini lembaga terkait menanggapi

dengan komitmen yang sama untuk permasalahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan JAKSTRADA Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan mendudukkan permasalahan bersama baik Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui akan fungsi pemanfaatan sampah kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Luankali, Bernadus.2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta. Amelia Press.
- Masdudin, Ivan.2012.*Kota dan Berbagai Permasalahannya*.Jakarta selatan.Buana Cipta Pustaka.
- Moleong, Lexy J.2014.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung.PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Mulyadi, Deddy.2016.*Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung. ALFABETA.
- Nugraha, Adrian R. 2009. *Menyelamatkan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Sampah*.Bekasi.PT Cahaya Pustaka Raga.
- Nugroho, Rianto. 2014. *Public Policy*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Pontas M. Pardede.2005.*manajemen operasi dan produksi:teori, model dan kebijakan*.Yogyakarta.ANDI.
- Safitri, Dian Prima, dkk.2016.*Teori Kebijakan Publik*. Tanjungpinang.UMRAH Press.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. PT.Refika Aditama.

- Stephen P. Robbins dan Mary Coulter.2009.*manajemen*.PT.INDEKS.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*.Bandung. Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2011.*Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*.Bandung.Alfabeta.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta. ANDI.

Sumber Jurnal :

- Bussalimin, Muji.2017.Implementasi Kebijakan Pemerintah Aceh Besar Terhadap Pengelolaan Sampah.*Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*.Vol.2, No.4. (www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP, diakses pada 27 Maret 2019).
- Herawati, Putri.2018. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan. *Jurnal Peelitian Administrasi Publik (JPAP)*.Vol.4.No.1.
- Maolani, Dedeng Yusuf dan Deding Ishak.2014. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Dili Negara Timor Leste.*Jurnal Ilmu Sosial*.Vol.1, No.2. (diakses pada 17 Desember 2018).
- Naditya, Rochyani¹, Agus Suryono², Mochamad Rozikin³. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) di Kelurahan Sukun Kota Malang.*Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.Vol.1, No.6. (diakses pada 27 Maret 2019).
- Nurmalasyiah dan Lilis Suryani.2018. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah).*Jurnal Administrasi Publik&Bisnis*.Vol.1, No.3. (diakses pada 27 Maret 2019).
- Radityaningrum, Arlini Dyah¹, Jenny Caroline², Dyah Kusuma Restianti³. 2017. Potensi *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) Sampah Pada Bank Sampah 'Bank Junk For Surabaya Clean (BJSC)'. *Jurnal Teknik Lingkungan*.Vol.3, No.1. (diakses pada 15 Juli 2019).
- Said, La Ode Agus¹, Mardiyono², Irwan Noor³. 2015. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau,*Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*.Vol.4, No.1. (diakses pada 17 Desember 2018).

- Siregar, Surya Murni dan Isnain.2014.Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dala Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir.*Jurnal Administrasi Publik*.Vol.6.No.2.
- Thahier, Rohana. 2014. Inovasi dan Kreativitas Manusia dalam Manajemen. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol.20.No.2. (diakses pada 20 Juli 2019).
- Bussalimin, Muji.2017.Implementasi Kebijakan Pemerintah Aceh Besar Terhadap Pengelolaan Sampah.*Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*.Vol.2, No.4. (www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP, diakses pada 27 Maret 2019).
- Maolani, Dedeng Yusuf dan Deding Ishak.2014. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Dili Negara Timor Leste.*Jurnal Ilmu Sosial*.Vol.1, No.2. (www.uinsgd.ac.id, diakses pada 17 Desember 2018).
- Naditya, Rochyani¹, Agus Suryono², Mochamad Rozikin³. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) di Kelurahan Sukun Kota Malang.*Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.Vol.1, No.6. (diakses pada 27 Maret 2019).
- Nurmalasyiah dan Lilis Suryani.2018. Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong (Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah).*Jurnal Administrasi Publik&Bisnis*.Vol.1, No.3. (<http://jurnal.stiatabalong.ac.id>, diakses pada 27 Maret 2019).
- Said, La Ode Agus¹, Mardiyono², Irwan Noor³. 2015. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau,*Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*.Vol.4, No.1. (diakses pada 17 Desember 2018).

Dokumen/data :

- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.0/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Periode 2017-2018.

Sumber Internet:

<https://suluhkepri.com/2019/01/14/walikota-syahrul-terima-piala-adipura-2018-dari-wapres-jusuf-kalla>.

